

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN (studi empiris pada pemerintah kota jayapura)

Sumartono¹

¹Dosen Program Studi Akuntansi Uniyap Jayapura

e-mail : sumartono@uniyap.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial maupun simultan pengaruh dari beberapa faktor diantaranya faktor penyusunan, faktor pengeluaran, faktor penggunaan serta faktor pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Sekretariat daerah Kota Jayapura.

Penyusunan anggaran, pengeluaran, penggunaan, dan pengawasan secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Dari Kontribusi variabel Penyusunan, pengeluaran, penggunaan, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar (R^2) = 0,611 atau 61.1%. Variabel Pengawasan Anggaran (X_4) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.

Kata Kunci : *Penyusunan Anggaran, Pengeluaran, Penggunaan, Pengawasan, Kinerja Keuangan*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang sering disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (*public services*) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.

Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dari segi ini peran eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar, guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, yang operasional pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada pasal 4 PP Nomor 105 tersebut

ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatutan.

Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan keuangan dan anggaran daerah masih dengan sistem tradisional, dengan ciri utamanya yaitu: 1) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, dan 2) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism. Sedangkan ciri lainnya, 3) cenderung sentralistis, 4) bersifat spesifikasi, 5) tahunan, 6) menggunakan prinsip anggaran bruto (Mardiasmo, 2001). Kondisi pengelolaan keuangan daerah seperti yang diungkapkan Sabeni dan Ghazali (1997) bahwa penyusunan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Meningkatnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang menghendaki adanya pelayanan pemerintah, sehingga orientasi alokasi anggaran akan tertuju pada kepentingan publik. Gambaran orientasi pada kepentingan publik ini dapat diketahui melalui proporsi alokasi anggaran yang lebih besar pada jenis layanan yang langsung dapat dinikmati masyarakat, dari pada kepentingan layanan yang tidak langsung dinikmati masyarakat.

Keterlambatan pengeluaran anggaran merupakan suatu hal yang sepele, akan tetapi mempunyai pengaruh sangat luas khususnya pada kinerja keuangan. Balai Pendidikan dan pelatihan menyadari hal itu, sehingga dalam setiap

penyusunan usulan permintaan pengeluaran anggaran dikerjakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan. Begitupun dengan Laporan keuangan untuk periode tertentu pada Realisasi anggaran tidak tepat waktu yang berakibat pada over prestise program/kegiatan terjadi pula pada Kantor Walikota Jayapura. Bahkan kejadian ini mungkin terjadi untuk sektor pemerintah pada umumnya. Penyebabnya bervariasi dari mulai pengusulan permintaan dana yang terlambat, penyelesaian kegiatan yang tidak tepat waktu sampai dengan birokrasi yang rumit dan panjang.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis berinisiatif untuk lebih fokus mendalami tentang pentingnya permintaan pengeluaran anggaran dan realisasinya bagi pembangunan kota Jayapura, dengan ide riset melakukan Analisis Terhadap Beberapa Faktor yang mempengaruhi kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyusunan, faktor pengeluaran, faktor penggunaan dan faktor pengawasan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura?
2. Apakah faktor penyusunan, pengeluaran, penggunaan dan pengawasan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura?

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kinerja Keuangan

Dalam konteks perusahaan, kinerja adalah hasil kerja yang menggambarkan tingkat pencapaian dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mewujudkan misi, visi sasaran dan tujuan perusahaan. Menurut Mathis and Jackson mendefinisikan bahwa kinerja merupakan rangkaian yang kritis antara strategi dan hasil organisasi. Rivai (2004) mengemukakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Dari pengertian tersebut memberikan ukuran tentang kinerja berupa tingkat hasil kerja perusahaan, yang digunakan untuk penilaian kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh perusahaan. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi/meningkatkan prestasi suatu perusahaan tempat di mana pegawai tersebut bekerja, sehingga tujuan perusahaan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu. Secara umum ada empat bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dari keempat laporan tersebut hanya 2 macam yang umum digunakan untuk analisis, yaitu laporan neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini disebabkan laporan perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan diikhtisarkan pada laporan neraca dan laporan laba rugi.

Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. Neraca suatu bank menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal dari bank tersebut pada saat tertentu. Neraca biasanya disusun pada akhir tahun pembukuan (31 Desember). Kekayaan atau harta disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban atau utang dan modal disajikan pada sisi pasiva. Laporan Laba Rugi suatu bank menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari bank tersebut pada periode tertentu. Sebagaimana halnya dengan neraca, laporan laba rugi biasanya disusun setiap akhir tahun pembukuan (31 Desember). Dalam Laporan Laba Rugi disusun jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang terjadi selama satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember. Apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah biaya akan menghasilkan laba, sedangkan apabila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya maka perusahaan mengalami kerugian.

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi dasar apakah manajemen berhasil atau tidak dalam melaksanakan kebijakan yang telah digariskan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dan hal ini akan dapat tergambar dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen.

Muljono (1999) mengemukakan; penilaian kinerja yaitu suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis, obyektif dengan berorientasi ke masa depan atas kebijakan/keputusan manajemen didalam mengelola sumber daya dan dana yang akan dipercayakan kepadanya dalam rangka meningkatkan profitabilitas maupun pencapaian tujuan lainnya, serta untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lebih profesional.

Kinerja adalah kemampuan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu yang dapat diukur dengan tingkat hasil

kerja yang telah dicapai saat itu. Dari pengertian tersebut memberikan ukuran tentang kinerja berupa tingkat hasil kerja perusahaan, yang dapat digunakan untuk penilaian kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.. Jadi, kinerja keuangan merupakan kemampuan keuangan yang dicapai suatu perusahaan pada periode waktu tertentu dengan ukuran peningkatan hasil kerja dibidang pengelolaan keuangan. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi bisa diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan serta penginterpretasian data keuangan sebuah organisasi. Pengklasifikasian yang dimaksud adalah pengelompokan kedalam pos-pos aktiva atau passiva dan begitu pula biaya dan pendapatan. Dari definisi tersebut diketahui bahwa pelaporan yang dimaksud adalah laporan keuangan. Menurut Munawir (1992:5) mengutip pendapat Myer mengatakan bahwa laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar rugi/laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan).

2.2.2 Fungsi Laporan Keuangan

Menurut [Harnanto \(1987\)](#) pengelolaan suatu perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar, mencakup tugas-tugas yang kompleks. Dari laporan keuangan, manajer memperoleh banyak informasi yang bermanfaat untuk : (1) Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu. (2) Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktifitas dalam perusahaan. (3) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan/aktifitas sehari-hari dalam perusahaan. (4) Mempelajari aspek-aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. (5) Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

2.2.3 Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari; neraca, perhitungan rugi-laba, perubahan

posisi keuangan (laporan perubahan modal atau laba yang ditahan). Untuk lebih memperjelas pemahaman akan laporan keuangan, maka berikut dikemukakan mengenai isi laporan keuangan yang terdiri dari : (1) Neraca, [Sutrisno \(2003\)](#) mengatakan, bahwa neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai dua sisi, sisi debit dan sisi kredit. Pada posisi debit menunjukkan posisi kekayaan perusahaan (aktiva) yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang perputarannya kurang atau maksimal dalam satu tahun. Termasuk dalam kelompok ini adalah; kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan dan perlengkapan. Aktiva tetap adalah aktiva yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun atau berjangka panjang. Termasuk dalam kelompok ini, adalah; tanah, bangunan dan gedung, mesin peralatan, kendaraan dan inventaris. Sedangkan pada sisi kredit atau passiva menunjukkan kekayaan perusahaan, yang terdiri dari dua sumber, yakni; hutang dan modal. Hutang terdiri dari dua macam, yakni; hutang jangka pendek (hutang lancar) yaitu hutang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, seperti; hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak dan hutang bank jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah hutang yang berjangka lebih dari satu tahun, seperti; hutang bank jangka panjang, hutang obligasi, hutang hipotik. Sisi passiva lainnya adalah modal yang terdiri dari modal saham, laba ditahan dan cadangan-cadangan. (2) Laporan Rugi-laba, Laporan rugi-laba adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama periode tertentu. Laporan rugi/laba pada dasarnya menggambarkan dua macam arus yang membentuk laba atau rugi ([Skousen, 2001](#)). Sesuai pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa laporan rugi/laba merupakan suatu informasi tentang penghasilan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Penghasilan adalah sejumlah aset yang dihasilkan melalui operasi usaha, sedangkan biaya adalah beban yang terjadi dalam kegiatan normal perusahaan. (3) Laporan Arus Kas, Laporan arus kas adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar pada suatu periode akibat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Menurut [Skousen \(2001\)](#) dalam laporan arus kas, bagian dari arus kas dikelompokkan menurut tiga kegiatan yaitu: kegiatan operasi adalah kegiatan sebagai bagian sehari-hari suatu perusahaan. Penerimaan kas dari penjualan barang-barang atau

dari memberikan jasa merupakan aliran kas masuk yang utama dari operasi. Arus kas keluar utama dari operasi termasuk pembayaran pembelian persediaan dan upah, pajak, bunga, utilities, sewa dan biaya-biaya sejenis. Kegiatan investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, gedung dan peralatan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan dimana kas diperoleh dan dibayar kembali kepada pemilik dan kreditor.

2.3 Sistem Pengelolaan keuangan Daerah

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Todaro (2000) menyatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi jika sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasi kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang menambah produktivitas. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan dengan pengertian sederhana bahwa kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru atau perbaikan cara lama yang menangani pekerjaan tradisional.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar sehingga sumberdaya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono, 2009)

Munir (2002) mengemukakan masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan

pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan produktif.

Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Kota Jayapura dalam bentuk pajak dan retribusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

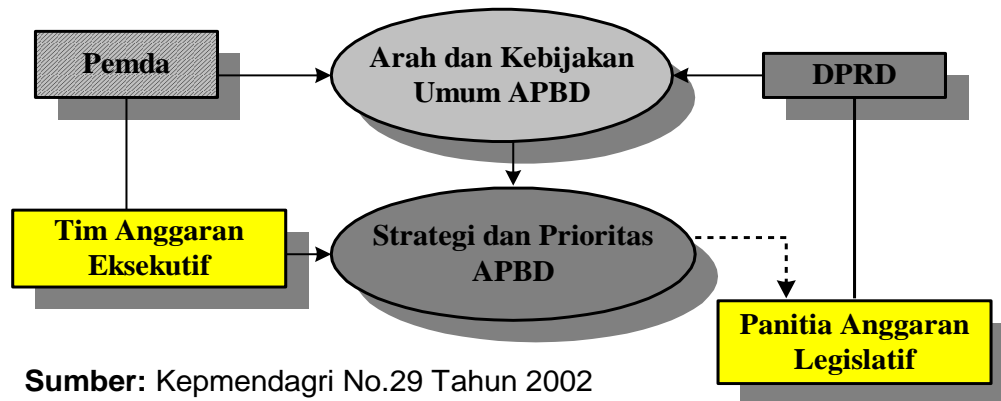
Klasifikasi Anggaran sebagai usaha sistematisasi jenis - jenis pengeluaran pemerintah kedalam kelompok yang lebih besar. Pengertian anggaran menurut Soelarno (1999) merupakan proyeksi kuantitatif dan rencana operasional tahapan dan menjadi landasan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah selama tahun yang bersangkutan. Sementara fungsi kegiatan pemerintah yang tercermin dalam anggaran pendapatan negara pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi, menurut Davey (1988) ada tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Alokasi Berupa Penyediaan Pelayanan Masyarakat

Dalam fungsi alokasi dibedakan antara barang - barang publik dan barang - barang privat (privat goods). Barang - barang publik merupakan barang - barang kebutuhan masyarakat banyak

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, strategi dapat dipandang sebagai suatu pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dana dan teknologi untuk mencapai suatu target kinerja. Melalui hubungan yang efektif antara

sumber daya manusia, teknologi dan lingkungannya. Strategi berkaitan dengan suatu tujuan, kebijakan, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang menyatakan sesuatu yang akan dikerjakan dan mengapa hal tersebut dikerjakan.



Gambar 2.2

Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mardiasmo (1999) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran

daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran / belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian, yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah dan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa, penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

1. proses penentuan penerimaan daerah;
2. proses penentuan belanja langsung;
3. proses penentuan belanja tidak langsung;

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah.

2.5 Penyusunan Anggaran

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN adalah: 1). intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, 2) intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, 3) penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah: 1) hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, 2) terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan, 3) semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Ada tiga metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran :

1. Anggaran disusun menurut keinginan (*wensbegroting*)

Dalam sistem ini penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat paling bawah dan diteruskan ke unit organisasi tingkat yang paling atas. Biasanya penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat eselon IV, kemudian ke tingkat organisasi eselon III. Dari tingkat eselon III selanjutnya ke tingkat eselon II dan akhirnya ke tingkat eselon I

2. Anggaran disusun berdasarkan plafon (*plafond begroting*).

Dalam sistem ini penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan pada ketentuan jumlah biaya pada batas tertinggi (plafond) yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakannya suatu kegiatan. Plafond anggaran yang telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas kemudian disampaikan kepada unit organisasi yang lebih rendah dan seterusnya sampai pada tingkat yang terendah, sehingga proses penyusunannya tampak terbalik dengan sistem *wensbegroting*.

3. Campuran dari keduanya

Sistem penyusunan inilah yang digunakan dalam penyusunan RAPBN di Indonesia. Hal ini terbukti dari mekanisme yang digunakan untuk menyusun APBN yang dimulai dengan pengisian DUK/DUP yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme *wensbegroting*, dan kemudian dalam tahap pengisian DIK/DIP digunakan mekanisme penyusunan plafond *begroting*.

2.6 Pengeluaran Anggaran

Pengeluaran Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan pemeliharaan.

2.7 Penggunaan Anggaran

Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran dilingkungan satker. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa PA atau KPA adalah kepala satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA (pasal 11 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2005). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (pasal 11 ayat 2, peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2005).

2.8 Pengawasan Anggaran

Pengawasan dapat disebut juga sebagai evaluating appraising atau correcting. Pengertian pengawasan yaitu proses penjamin pencapaian tujuan organisasi. Jadi disini ada kaitan yang erat antara pengawasan dan perencanaan. Langkah awal suatu pengawasan sebenarnya adalah perencanaan dan penetapan tujuan berdasarkan pada standar atau sasaran. Menurut Robert (1996) pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Salah satu fungsi APBN/APBD adalah fungsi pengawasan, dimana anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara di pusat

maupun di daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Sedangkan menurut Winardi (2000) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa penyusunan, pengeluaran, penggunaan dan pengawasan anggaran sangat berpengaruh pada kinerja keuangan, maka model penelitian yang dikembangkan adalah menganalisis dan mencari pengaruh faktor penyusunan, pengeluaran, penggunaan dan pengawasan anggaran sebagai variabel bebas, dan kinerja keuangan sebagai variabel terikatnya, seperti gambar berikut :



Kerangka Konseptual Penelitian

2.10 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Penyusunan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura.
- H₂ : Pengeluaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura.
- H₃ : Penggunaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura.
- H₄ : Pengawasan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura

H₅ : Penyusunan, pengeluaran, penggunaan dan pengawasan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Jayapura.

III. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Rancangan atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yaitu Penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil” (Saifuddin, 2001). Bila ditinjau dari tingkat penjelasan (*level of explanation*), penelitian ini bersifat asosiatif.

Dimana Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih”. Sehingga pada Penelitian ini akan menganalisis beberapa Faktor yang di prediksi mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura dengan menggunakan teknik analisis statistik regresi linier berganda (*multiple regresi linear*).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Sekretariat daerah Kota Jayapura. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *startified Random Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pengelompokan elemen-elemen atau sub

populasi (Nasir 1998), dan untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sampel digunakan rumus di bawah ini :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditelorir.

Sumber : (Umar 2003)

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 orang responden.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Bidang	Populasi			Sampel		
		PNS	Kontrak	Jmlah	PNS	Kontrak	Jmlah
1	Kepala BPKAD	1	-	1	-	-	-
2	Ka. Anggaran	1	-	1	1	1	2
3	Ka. Pembukuan	1	-	1	1	1	2
4	Staf Ahli	20		2	5	1	6
5	Staf BPKAD	125	30	155	50	5	55
	Jumlah	148	35	160	57	8	65

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penyusunan anggaran

Penyusunan adalah sistem penetapan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura agar dalam pelaksanaan penggunaan tidak terlepas dari scedule penyusunan anggaran pemerintah kota.

3.3.2 Variabel Pengeluaran anggaran

Pengeluaran Anggaran adalah jumlah anggaran yang telah disepakati saat peyusunan berdasarkan anggaran SKPD untuk dikelola oleh pemerintah kota Jayapura

3.3.3. Variabel Penggunaan anggaran

Penggunaan Anggaran adalah jumlah anggaran yang digunakan untuk mengelola apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Kota Jayapura

3.3.4 Variabel Pengawasan anggaran

Pengawasan anggaran adalah sistem pengontrolan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura agar anggaran yang dikeluarkan sesuai apa yang telah disusun, dikeluarkan dan digunakan.

3.3.5 Variabel Kinerja keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur guna penghematan, kesalahan dan sebagainya. Tapi

hampir seluruh cara pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan hal berikut, yakni : kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, kemampuan, maupun sikap. Dalam penelitian ini yang menjadi indikatornya adalah kuantitas hasil kerja, dan kualitas hasil kerja.

4 Instrumen Penelitian

.1 Angket (*questionnaire*)

Merupakan seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan pada responden. Koesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penyebaran angket dalam penelitian memiliki dua tahapan, antara lain adalah : observasi; Mengamati aktifitas anggota secara langsung dalam melaksanakan tugasnya, dan wawancara (*Interview*) yaitu melakukan diskusi maupun wawancara secara langsung. Perolehan data atau informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Jayapura, dengan harapan dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

.2 Studi literatur

Yakni mempelajari dan mengumpulkan informasi dari data sekunder yang telah ada mengenai semua data Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Jayapura.

5 Teknik Pengukuran Instrumen

Metode pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Dengan skala likert variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator variabel tersebut dijadikan menjadi komponen-komponen yang dapat diukur, lalu menjadi titik tolak untuk menyusun item instrumen berupa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden”.

Instrumen yang menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis, digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari para responden. Skala pengukuran atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* yang dilambangkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Dalam hal ini jawaban responden dibagi menjadi 5 kategori pemeringkatan skala *liket* seperti dalam tabel berikut,yaitu:

Tabel Pemeringkatan Skala *Likert*

No	Pilihan Jawaban	Keterangan	Bobot
1	Sangat Setuju	SS	Diberi Skor 5
2	Setuju	S	Diberi Skor 4
3	Netral	N	Diberi Skor 3
4	Tidak Setuju	TS	Diberi Skor 2
5	Sangat Tidak setuju	STS	Diberi Skor 1

Sumber : (Sugiyono, 2014)

7. Uji Validitas Dan Reliabilitas

7.1 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen koesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Cara yang dilakukan adalah dengan menganalisa item, dimana setiap nilai item pertanyaan dibandingkan dengan total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah dengan $r \geq 0,3$. Jadi apabila korelasi antara butir-butir dengan skala total kurang dari 0,3 maka dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

7.2 Uji Reliabilitas

Jika alat ukur dinyatakan valid, selanjutnya realibilitas alat ukur tersebut di uji. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk mengukur tingkat reliabilitas digunakan teknik dari *Cronbach*, karena instrumen pengukurnya merupakan rentangan antara beberapa nilai. Rumus teknik *Cronbach* :

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Dimana:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

σ_t^2 = Variabel total

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah butir varian

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, ada 2 teknik analisis data yang digunakan:

8.1 Analisis Distribusi Frekuensi

Untuk mengetahui apakah sistem Kinerja keuangan kota Jayapura sudah berjalan dengan baik atau tidak, serta untuk mengetahui apakah sistem Kinerja keuangan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kota Jayapura.

Data-data diperoleh melalui jawaban responden atas kusioner yang disebarkan dan disertai dengan alternatif jawaban yang diberi skor bertingkat dan berskala kemudian dilakukan tabulasi. Setiap responden yang memilih jawaban sama dijumlahkan dan dikalikan skor masing-masing pilihan sehingga ditemukan skor total tiap-tiap item pertanyaan, kemudian dihitung pula skor rata-rata tiap variabel dengan menjumlahkan total skor semua pertanyaan mengenai suatu variabel yang dibagi jumlah item pertanyaan variabel tersebut, maka dapat dilakukan dengan membuat rentang skala dengan rumus :

$$Rs = \frac{n(m-1)}{m}$$

Dimana :

Rs = Rentang skala / kriteria

n = Jumlah sampel

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item pertanyaan

8.2 Regresi Linier Berganda

Yakni untuk melihat dan mengetahui seberapa jauh jumlah nilai suatu variabel tergantung pada variabel lainnya. Model ini dikembangkan untuk mengestimasi nilai variabel dependen Y dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_n$). Dalam menggunakan analisis

regresi linier berganda harus memenuhi *uji asumsi klasik* yang meliputi :

a. Uji Normalitas

Dimaksudkan untuk mengetahui apakah dari variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Atau dengan kata lain tujuan dari uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual tersebar secara normal atau tidak. *P-Value* uji kenormalan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* paling rendah atau lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinier berarti adanya korelasi linier yang tinggi antara dua atau lebih variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinier antar variabel, salah satu caranya bisa dilihat dari *Variable Inflation Faktor* (VIF) masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 (sepuluh), maka mengindikasikan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinier.

c. Uji Homokedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang timbul dalam fungsi regresi adalah non-heteroskedastisitas (homoskedastisitas), yaitu data mempunyai varian yang sama. Sehingga tidak terjadi heterokedastisitas bila varian Y berubah, karena variabel X berubah, sehingga timbul perbedaan karena adanya gangguan (e_i) yang timbul dalam fungsi regresi mempunyai varian yang berbeda. Jika homokedastisitas ingin terpenuhi, maka nilai signifikan untuk semua variabel pada nilai mutlak residual harus lebih besar dari 0,05.

9. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Adapun Uji F yang dimaksud, sebagai berikut:

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura,

Rumus dari uji F sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi yang telah ditemukan

k = jumlah variabel *independent*

n = jumlah sampel

F = uji hipotesis

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :

♦ $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak

♦ $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima

b. Uji t

Uji t ini dimaksudkan untuk menguji secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kota jayapura.

Adapun Rumus dari uji t adalah sebagai berikut :

$$t(b_i) = \frac{b_i}{SE(b_i)}$$

Keterangan :

B_i = koefisien regresi

$SE(b_i)$ = standar *error* koefisien regresi

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :

♦ Menetapkan variabel yang bermakna dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung $>$ t tabel, maka dikatakan signifikan.

♦ Dari variabel yang bermakna, dipilih yang paling signifikan.

♦ Bila variabel penilai memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan variabel bebas lainnya, maka secara empiris terbukti.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil penelitian melalui instrument angkat yang dilakukan responden pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Jayapura, diperoleh data sesuai dengan variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, terdiri variabel bebas (*independent variables*) Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4), Sedang variabel terikat adalah Kinerja Keuangan (Y).

Pemantauan ini dilakukan untuk mengkonfrontasi apakah data yang diperoleh melalui data primer sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Data sekunder ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan pembahasan penelitian. Hasil tabulasi data dari hasil penelitian secara deskriptif sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Statistik Deskripsi Variabel Penelitian.

	Penyusunan	Pengeluaran	Penggunaan	Pengawasan	Kinerja_Keu
Valid	65	65	65	65	65
Missing	0	0	0	0	0
Std. Deviation	.2893	.3383	.4247	.4182	.2957
Variance	.084	.114	.180	.175	.087
Range	1.6	1.4	2.0	2.0	1.6
Minimum	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Maximum	4.6	4.4	5.0	5.0	4.6

Data diolah 2016

1. Deskripsi Variabel Penyusunan anggaran (X₁)

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden atas variabel penyusunan Anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura secara deskripsi menunjukkan

bahwa nilai rata-rata sebesar 4.6 dengan standar deviasi sebesar 0.289 dengan tingkat varians adalah 0,084 dan nilai tertinggi 4.6 sedangkan nilai terendah sebesar 3.0

Distribusi frekuensi variabel penyusunan anggaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Penyusunan Anggaran (X₁)

No.	Tanggapan (Skala)	Interval	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0.01 – 1.80	38	84%
2	Setuju	1.81.– 2.60	27	16%
3	Netral	2.61 – 3.40	0	0%
4	Tidak setuju	3.4 – 4.20	0	0%
5	Sangat tidak setuju	4.21 – 5.0	0	0%
Jumlah			65	100%

Data diolah 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 38 orang atau 84 % pegawai yang memberikan tanggapan sangat setuju terhadap sistem penyusunan anggaran. Kemudian terdapat 27 orang atau 16% pegawai yang memberikan tanggapan setuju atas penerapan penyusunan anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Sedangkan yang berkategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tidak seorang pun pegawai yang masuk kategori tersebut, berarti sebagian besar pegawai menganggap penerapan sistem penyusunan anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan

dan Asset Kota Jayapura adalah penting untuk dapat menunjang kinerja keuangan.

2. Pengeluaran Anggaran (X₂)

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden atas variabel Pengeluaran Anggaran terhadap Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura secara deskripsi menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 4,4 dengan standar deviasi sebesar 0.338 dengan tingkat varians adalah 0,114 dan nilai tertinggi 4.4 sedangkan nilai terendah sebesar 3.

Distribusi frekuensi variabel agen dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Pengeluaran Anggaran (X₂)

No.	Tanggapan (Skala)	Interval	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0.01 – 1.80	45	64%
2	Setuju	1.81.– 2.60	20	36%
3	Netral	2.61 – 3.40	0	0%
4	Tidak setuju	3.4 – 4.20	0	0%
5	Sangat tidak setuju	4.21 – 5.0	0	0%
Jumlah			65	100%

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 45 orang atau 64 % pegawai yang memberikan tanggapan sangat setuju terhadap mekanisme pengeluaran anggaran. Kemudian terdapat 20 orang atau 36% pegawai yang memberikan tanggapan setuju atas mekanisme pengeluaran anggaran. Sedangkan yang berkategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tidak seorang pun pegawai yang masuk kategori tersebut, berarti sebagian besar pegawai menganggap mekanisme pengeluaran anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan

dan Asset Kota Jayapura adalah penting untuk dapat menunjang kinerja keuangan .

3. Penggunaan Anggaran (X₃)

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden atas variabel Penggunaan Anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura secara deskripsi menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 5,0 dengan standar deviasi sebesar 0.424 dengan tingkat variansi adalah 0,180 dan nilai tertinggi 5.0 sedangkan nilai terendah sebesar 3.0

Distribusi frekuensi variabel penggunaan anggaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Penggunaan Anggaran (X₃)

No.	Tanggapan (Skala)	Interval	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0.01 – 1.80	37	66%
2	Setuju	1.81 – 2.60	28	34%
3	Netral	2.61 – 3.40	0	0%
4	Tidak setuju	3.4 – 4.20	0	0%
5	Sangat tidak setuju	4.21 – 5.0	0	0%
Jumlah			65	100%

Data diolah 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 37 orang atau 66 % pegawai yang memberikan tanggapan sangat setuju terhadap mekanisme penggunaan anggaran. Kemudian terdapat 13 orang atau 34% pegawai yang memberikan tanggapan setuju pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Sedangkan yang berkategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tidak seorang pun pegawai yang masuk kategori tersebut, berarti sebagian besar pegawai menganggap mekanisme penggunaan anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura

adalah penting untuk dapat menunjang kinerja keuangan.

4. Pengawasan Anggaran (X₄)

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden atas variabel Pengawasan Anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura secara deskripsi menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 5,0 dengan standar deviasi sebesar 0.418 dengan tingkat variansi adalah 0,175 dan nilai tertinggi 5.0 sedangkan nilai terendah sebesar 3.0

Distribusi frekuensi variabel pengawasan anggaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 8
Distribusi Pengawasan Anggaran (X₄)

No.	Tanggapan (Skala)	Interval	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0.01 – 1.80	37	66%
2	Setuju	1.81 – 2.60	28	34%
3	Netral	2.61 – 3.40	0	0%
4	Tidak setuju	3.4 – 4.20	0	0%
5	Sangat tidak setuju	4.21 – 5.0	0	0%
Jumlah			65	100%

Data diolah 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 37 orang atau 66 % pegawai yang

memberikan tanggapan sangat setuju terhadap mekanisme pengawasan anggaran. Kemudian

terdapat 28 orang atau 34% pegawai yang memberikan tanggapan setuju pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Sedangkan yang berkategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tidak seorang pun pegawai yang masuk kategori tersebut, berarti sebagian besar pegawai menganggap sistem pengawasan anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura adalah penting untuk dapat menunjang kinerja keuangan.

5. Kinerja Keuangan (Y)

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden atas variabel kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura secara deskripsi menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 4,6 dengan standar deviasi sebesar 0.295 dengan tingkat varians adalah 0,087 dan nilai tertinggi 4,6 sedangkan nilai terendah sebesar 3.0

Distribusi frekuensi variabel kinerja keuangan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10
Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan (Y)

No.	Tanggapan (Skala)	Interval	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0.01 – 1.80	36	74%
2	Setuju	1.81 – 2.60	29	26%
3	Netral	2.61 – 3.40	0	0%
4	Tidak setuju	3.4 – 4.20	0	0%
5	Sangat tidak setuju	4.21 – 5.0	0	0%
Jumlah			65	100%

Data diolah 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 36 orang atau 74 % pegawai yang memberikan tanggapan sangat setuju terhadap kinerja keuangan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Kemudian terdapat 29 orang atau 26% pegawai yang memberikan tanggapan setuju atas kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola

Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Sedangkan yang berkategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tidak seorang pun pegawai yang masuk kategori tersebut.

4.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan dengan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16 for Windows, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11
Ringkasan Hasil Analisis Statistik

Variabel	Arah	Kor Pars.	Koef. Reg	Nilai t	P(Sig)	Keterangan
Kinerja Keuangan (Y)						
Penyusunan (X_1)	(+)	0.506	0.377	4.543	0.000	Signifikan
Pengeluaran (X_2)	(+)	0.317	0.218	2.592	0.012	Signifikan
Penggunaan (X_3)	(+)	0.267	0.117	2.142	0.036	Signifikan
Pengawasan (X_4)	(+)	0.571	0.366	5.389	0.000	Signifikan
Konstanta = - 0.268						
R^2 = 0.611						
F_{hit} = 26.163				Sig = 0,000		Signifikan

Data diolah 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = - 0.268 + 0.377 X_1 + 0.218 X_2 + 0.117 X_3 + 0.366 X_4 + e_i$.

Persamaan di atas memberikan interpretasi bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -0.268 menunjukkan arah negative yang berarti bahwa kinerja keuangan akan menurun sebesar nilai konstanta yaitu sebesar -0.268 apabila tanpa

adanya variabel penyusunan, pengeluaran, penggunaan, dan pengawasan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.

2. Nilai koefisien regresi variabel penyusunan anggaran (X_1) sebesar 0.377 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa apabila mekanisme penyusunan anggaran ditingkatkan satu unit satuan maka akan meningkatkan kinerja

keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar 0.377, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran anggaran (X_2) sebesar 0.218 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa apabila pengeluaran anggaran ditingkatkan satu unit satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar 0.218, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel penggunaan anggaran (X_3) sebesar 0.117 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa apabila variabel penggunaan anggaran ditingkatkan satu unit satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar 0.117, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan (X_4) sebesar 0.366 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa apabila variabel pengawasan ditingkatkan satu unit satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar 0.366, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya tetap.

4.3 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Parsial

Pengujian hipotesis parsial yaitu Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4), mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Hasil perhitungan dan analisis data dengan menggunakan alat analisis SPSS 16.0 for window sebagaimana pada tabel 11, menunjukkan bahwa:

- a) Penyusunan Anggaran (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.377, nilai t_{hitung} sebesar 4.543 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu penyusunan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$.
- b) Pengeluaran anggaran (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.218, nilai t_{hitung}

sebesar 2.592 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.012. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu pengeluaran anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$.

- c) Penggunaan Anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.117, nilai t_{hitung} sebesar 2.142 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.036. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu penggunaan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$.
- d) Pengawasan Anggaran (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.366, nilai t_{hitung} sebesar 5.389 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu pengawasan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$.

2. Pengujian Hipotesis Simultan

Hasil analisis statistik melalui Program SPSS 16 for windows diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, yang dapat ditunjukkan melalui $F_{hitung} = 26.163$ dan $P (sig) = 0,000 < 0,050$. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) mempunyai berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura adalah terbukti.

Kontribusi variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura yang dapat ditunjukkan melalui besarnya koefisien determinasi (R^2) = 0,611 atau 61.1% variasi dari kinerja keuangan pada Kantor Badan

Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapuradapat dijelaskan oleh variabel bebas dan sisnya 38.9% ditentukan oleh faktor lain di luar dari model yang diteliti.

3. Pengujian Variabel yang Dominan

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari beberap variabel bebas terdiri Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4), diperoleh nilai koefisien korelasi parsial yang paling tinggi adalah variabel Pengawasan Anggaran (X_4) sebesar 0.571 dan nilai t hitung yang paling besar yaitu sebesar 5.389 dengan nilai signifikannya yang paling kecil yaitu 0.000, dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Dengan demikian bahwa variabel Pengawasan Anggaran (X_4) yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.

4.3 Pembahasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) mempunyai berpengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura. Dengan demikian, kinerja keuangan setiap kegiatan SKPD merupakan kunci pencapaian produktivitas. Karena hasil kinerja keuangan adalah suatu hasil dimana orang-orang dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, termasuk kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapuramemerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Penataan keberhasilan kinerja keuangan dalam bentuk Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) memiliki mekanisme kerja jangka panjang untuk mengklasifikasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan anggaran, baik anggaran pusat maupun daerah dan untuk mengetahui apakah dan bagaimana hubungan tersebut dapat di eksploitasi untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu SKPD. Kinerja keuangan yang baik dapat memberikan dampak padakantor atau setiap instansi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kinerja keuangan mempunyai dampak terhadap kepuasan jangka panjang dan menunjang karir bagi mereka yang melaksanakan efisiensi dan efektifitas kerja yang mapan

- 2) Kinerja keuangan mungkin akan menjadi suatu faktor bahkan lebih penting lagi dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi di masa datang.

Pengukuran kepuasan harus dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat dari suatu aktivitas program secara menyeluruh. Untuk menghasilkan suatu pengukuran kepuasan yang baik diperlukan suatu artikulasi yang jelas tentang rencana strategik setiap departemen dalam suatu organisasi yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak diukur serta hubungan dari hasil kegiatan yang hendak dilaksanakan.

Pengukuran kinerja keuangan yang baik hendaknya terfokus pada pengambilan tindakan untuk setiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai untuk suatu waktu tertentu, dimana setiap bagian dalam organisasi sedang dalam upaya menuju sasaran dan tujuan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategiknya. Selanjutnya pengukuran keberhasilan kinerja keuangan harus mengukur hasil, akibat (Outcome) dan pengeluaran anggaran yang dipercayakan pada bagian yang bersangkutan dengan cara pengukuran dan metode penilaian kepuasan yang sesuai dengan bagian atau subsistim dalam organisasi tersebut.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan padakantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.
2. Secara bersama-sama/simultan variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.
3. Kontribusi variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura sebesar $(R^2) = 0,611$ atau 61.1%.
4. Variabel Pengawasan Anggaran (X_4) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan padakantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura.

B. Saran - Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan baik kepada pegawai pimpinan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, antara lain:

1. Untuk memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, maka disarankan agar pimpinan kantor senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan mampu memberi arahan pelayanan pegawai secara terus-menerus kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan lebih rajin bekerja, cepat melakukan pekerjaan dan tepat waktu menyelesaikan pekerjaannya dengan loyalitas yang tinggi.
2. Supaya setiap mekanisme kinerja keuangan dapat berjalan dengan baik, maka pimpinan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, senantiasa mengupayakan perbaikan terutama menata organisasinya secara kondusif dengan memenuhi kekurangan sarana kerja, sehingga setiap yang dikerjakan berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan dapat berjalan dengan baik.
3. Pengawasan Anggaran mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, maka hendaknya pimpinan menerapkan kinerja keuangan dengan efektif.
4. Variabel Penyusunan (X_1), pengeluaran (X_2), penggunaan (X_3), dan pengawasan (X_4) mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Jayapura, oleh karena itu hendaknya faktor-faktor tersebut menjadi perhatian bagi pimpinan dan pegawai itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, Boediono. 2009. (Boediono, 2004). Yogyakarta: BPFE.
- Davey, K, J. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek dan Relevansi Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harnanto, Harnanto. 1987. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Koswara, E. 2000. Evaluasi Dampak Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU NO. 25 Tahun 1999 Terhadap Kewenangan Daerah Daerah

- Provinsi. In Seminar Evaluasi Pelaksanaan OTDA. STPDN Bandung.
- Makhfatih, A. 2005. Penggelapan Pajak di Indonesia: Studi Pajak Hotel Non Bintang. Disertasi, Univeritas Gadjah Mada.
- Mamesah, D, J. 1995. D.J. Mamesah (2001) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2000. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik." Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia (JAAI) no. IV (1).
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2001. "Budgetary Slack Result from the Effects of Local Government Financial Government in Planning Local Government Budget: The Case of Indonesia." Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen Ekonomi.
- Muljono, Teguh, Pudjo. 1999. Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan. Jakarta: Djambatan. Cetakan, Keenam.
- Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Mataram: Bappeda Propinsi NTB. Cetakan, Kedua.
- Munir, Badrul. 2003. Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.
- Nasir, Mohamad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan, Keempat.
- Robert, J, Mockler. 1996. The Management Control Proces. Translated by Handoko. Englewood Clift: Prentice Hal.
- Sabeni, Arifin, dan Imam Ghazali. 1997. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Keempat ed. Yogyakarta: BPFE.
- Saifuddin, Azwar. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skousen, Fred, K. 2001. Akuntansi Keuangan Menengah. Edisi Pertama : Thomson Learning.
- Soelarno, Slamet. 1999. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: STIA LAN Press.
- Sugiyono, Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mix Methods*) Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi). Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonosia. Reprint, Kedua.
- Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. 2000. Manajer dan Manajemn. Bandung: Citra Aditya Bhakti